

Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak serta dana bagi hasil non pajak terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi kalimantan timur

Yuliana^{1*}, Adi Wijaya², Muliadi³

^{1,2,3}Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

*¹Email: yulia@pt-ppi.com

²Email: adi.wijaya@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Non Pajak terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dirancang menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2018 dengan teknik Analisis Jalur. Temuan empiris menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif dan signifikan, sementara Dana Bagi Hasil Non Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan, serta Dana Bagi Hasil Non Pajak dan Belanja Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Non Pajak sama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan asli daerah; dana bagi hasil pajak; dana bagi hasil non pajak; belanja daerah; pertumbuhan ekonomi

The effect of local revenue, tax revenue sharing funds and non tax revenue sharing funds on regional expenditure and east kalimantan economic growth

Abstract

National development activities cannot be separated from the participation of local governments in utilizing the resources available in their respective regions in an effort to enlarge the capabilities of the region. The purpose of this study is to analyze the direct and indirect effects of the Regional Own Revenues, Tax Revenue Sharing Funds, and Non-Tax Revenue Sharing Funds on Regional Expenditure and Economic Growth in East Kalimantan Province. The study was designed using secondary data from 2009-2018 with Path Analysis techniques. Empirical findings suggest that Regional Original Revenue and Tax-Sharing Funds have a positive and significant effect, while Non-Tax-Sharing Funds have a positive and not significant effect on Regional Expenditures. Local Own Revenue has positive and significant effect, while the Tax Sharing Fund has a negative and insignificant effect, and the Non-Tax Revenue Sharing Fund and Regional Expenditure has a positive and insignificant effect on Economic Growth. Regional Original Revenues, Tax Revenue Sharing Funds, and Non-Tax Revenue Sharing Funds have both positive and insignificant effects on Economic Growth through Regional Expenditures.

Keywords: Locally-generated revenue; tax profit sharing funds; non-tax profit sharing funds; regional expenditures; economic growth

PENDAHULUAN

Menurut Sukirno (2002;10) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi fiskal itu dilaksanakan. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan daerah. Diharapkan, semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin memperbesar tingkat perekonomian disuatu daerah.

Tabel 1. Data keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi provinsi kalimantan timur, 2014-2018

Tahun	PAD (Rp000)	DBH (Rp000)	DBH Non Pajak (Rp000)	Belanja Daerah (Rp000)	LPE (%)
2014	5.771.201.825,75	662.727.209,28	3.532.243.333,33	12.217.683.000	1,71
2015	5.095.145.980,60	2.279.275.611,00	14.613.321.379,00	8.598.988.301	-1,20
2016	3.921.364.868,07	1.112.926.782,23	2.700.200.757,20	7.601.242.339	-0,38
2017	4.588.751.727,47	609.621.646,54	1.101.073.440,28	8.239.051.588	3,13
2018	4.281.264.186,00	680.000.000,00	3.368.252.814,00	8.566.250.000	2,67
Rata-rata	4.731.545.717,58	1.068.910.249,81	5.063.018.344,76	9.044.643.046	1,10

Berdasarkan sajian data yang terangkum pada Tabel 1, diketahui jika indikator makro ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur seperti kondisi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi nampak berfluktuatif. Dari kondisi yang kurang stabil tersebut, sangat berdampak pada aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, capaian tertinggi di angka Rp 5.771.201.825,75 ribu pada 2014 dengan rata-rata selama masa pengamatan (5 tahun) mencapai Rp 4.731.545.717,58 ribu. Disisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak daerah nominalnya secara garis besar cukup jauh ketimbang DBH yang bersumber dari Alam (non-pajak) dengan perbandingan rata-rata Rp 1.068.910.249,81 ribu dan Rp 5.063.018.344,76 ribu atau sekitar 5 kali lipatnya. Untuk DBH sendiri, tertinggi ditahun 2015 (Rp 2.279.275.611,00 ribu) dan DBH non-pajak terbesar berada pada tahun serupa yakni Rp 14.613.321.379,00 ribu. Dari sisi Belanja Daerah atau Pengeluaran Pemerintah, realisasi anggaran tertinggi untuk tahun 2014 mencapai Rp 12.217.683.000 ribu dan rata-ratanya dalam 5 tahun adalah Rp 9.044.643.046 ribu. Bagi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan 2010, rata-ratanya sekitar 1,10%, dimana pertumbuhan tertinggi hanya terbilang (termasuk kategori rendah), yaitu 3,13% pada 2017 dan itu sempat terjadi pertumbuhan dalam slope negatif di 2 (dua) tahun sebelumnya, tepatnya pada 2015 dan 2016.

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan menggunakan prinsip by origin (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Berdasarkan uraian tersebut, maka

dalam penelitian ini akan melihat sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Non Pajak dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan melihat pertimbangan sisi makro ekonomi, khususnya PAD, DBH, DBH Non-Pajak, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur, telah menjadi sebuah fenomena yang patut untuk diteliti lebih lanjut. Seperti yang diketahui, bahwa dalam mencapai pembangunan ekonomi yang merata, diperlukan berbagai kebijakan makro ekonomi yang tepat dan terarah, agar mendorong kesejahteraan masyarakat dan mederuksi kesenjangan sosial bagi Kalimantan Timur. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Non Pajak terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.

METODE

Rancangan dalam penelitian ini pada umumnya terbagi atas tiga bentuk yakni penelitian eksploratori (explorative research), penelitian deskriptif (descriptive research), dan penelitian eksplanatori (explanatory research). Penelitian adalah jenis penelitian yang berusaha untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Sedangkan, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain.

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, karena perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, DBH Non Pajak, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, serta beberapa faktor dalam menunjang proses pembangunan di Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2018 dengan teknik Analisis Jalur (Path Analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisa, diketahui besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung, serta pengaruh PAD (X1), DBH Pajak (X2), dan DBH Non Pajak (X3) sebagai variabel endogen terhadap variabel ekosgen yakni Pertumbuhan Ekonomi (Y2) melalui Belanja Daerah (Y1) sebagai variabel intervening.

Tabel 2. Nilai koefisien jalur dan pengujian hipotesis

Variabel	Hubungan	thitung	Sig.	Interpretasi
PAD – Belanja Daerah	0,257	4,595	0,002	Positif dan Signifikan
DBH Pajak – Belanja Daerah	0,569	2,363	0,050	Positif dan Signifikan
DBH Non Pajak – Belanja Daerah	0,248	0,984	0,358	Positif dan Tidak Signifikan
PAD – Pertumbuhan Ekonomi	0,731	2,955	0,025	Positif dan Signifikan
DBH Pajak – Pertumbuhan Ekonomi	-0,570	-0,798	0,455	Negatif dan Tidak Signifikan
DBH Non Pajak – Pertumbuhan Ekonomi	0,002	0,004	0,997	Positif dan Tidak Signifikan
Belanja Daerah – Pertumbuhan Ekonomi	0,764	0,914	0,396	Positif dan Tidak Signifikan
PAD – Belanja Daerah – Pertumbuhan Ekonomi	0,196	-	1,132	Positif dan Tidak Signifikan
DBH Pajak – Belanja Daerah – Pertumbuhan Ekonomi	0,437	-	0,201	Positif dan Tidak Signifikan
DBH Non Pajak – Belanja Daerah – Pertumbuhan Ekonomi	0,189	-	0,601	Positif dan Tidak Signifikan

Dari Tabel 2, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ditemukan jalur (sub-struktur 1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sehingga tidak ada jalur yang dihilangkan. Pada sub-struktur 2, juga terdapat jalur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Sedangkan, dari

pengaruh tidak langsung, terdapat jalur (melalui variabel intervening) berpengaruh positif. Namun tidak signifikan Sesuai dengan kerangka konsep penelitian, dapat dihasilkan 2 fungsi linier, yaitu: sub-struktur 1 dan 2. Kedua fungsi yang dihasilkan tersebut secara simultan tergabung menjadi sub-struktur 1 jalur. Variabel bebas (eksogen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (endogen). Hubungan dari kedua variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pada fungsi-1, variabel bebas = X1, X2, X3, dan variabel terikat = Y1

Pengaruh langsung terhitung seperti pada standardize regression weight (koefisien). Pada fungsi-1, X1, X2 dan X3 mempunyai pengaruh secara langsung pada Y1. Total pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Y1 sama dengan pengaruh langsungnya. Penulisan fungsi atau sub-struktur 1 dalam bentuk standar adalah:

$$Y1 = 0,257 X1 + 0,569 X2 + 0,248 X3 + 0,012 \text{ } \text{E}1$$

Pada fungsi-2, variabel bebas = X1, X2, X3, Y1, dan terikat = Y2

Pengaruh langsung terhitung seperti pada standardize regression weight (koefisien). Pada fungsi-2, X1, X2, X3, dan Y1 mempunyai pengaruh secara langsung pada Y2. Total pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Y2 sama dengan pengaruh langsungnya. Penulisan fungsi atau sub-struktur 2 dalam bentuk standar adalah:

$$Y2 = 0,731 X1 - 0,570 X2 + 0,002 X3 + 0,764 Y1 + 0,05 \text{ } \text{E}2$$

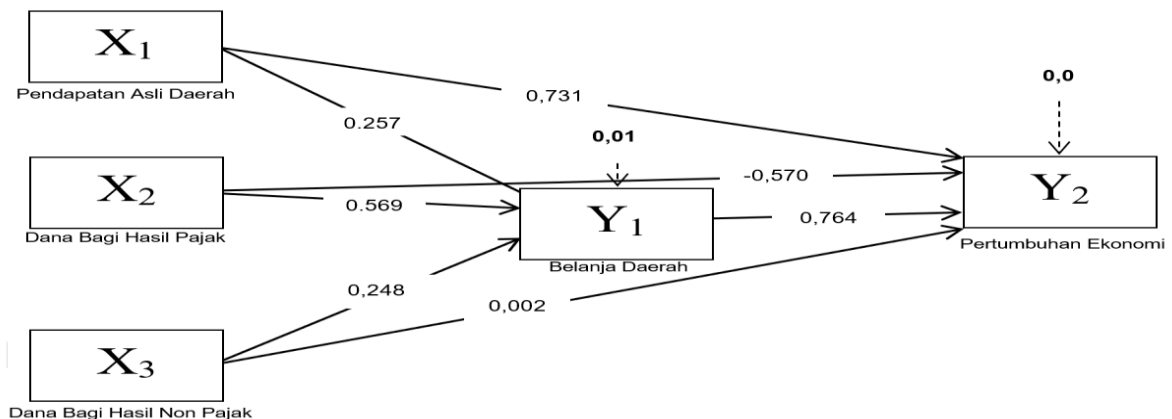
Pengaruh total merupakan penjumlahan pengaruh langsung dengan tidak langsung dengan ketentuan ini, maka total pengaruh dari semua variabel penelitian dapat dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil pengaruh langsung, tidak langsung, dan total

Hubungan	Pengaruh langsung	Pengaruh tak langsung melalui Y1	Pengaruh total
X1 ---> Y1	0,257	-	0,257
X2 ---> Y1	0,569	-	0,569
X3 ---> Y1	0,248	-	0,248
X1 ---> Y2	0,731	-	0,731
X2 ---> Y2	-0,570	-	-0,570
X3 ---> Y2	0,002	-	0,002
Y1 ---> Y2	0,764	-	0,764
X1 ---> Y1 ---> Y2	-	0,257 x 0,764 = 0,196	(0,257 x 0,764) + 0,731 = 0,927
X2 ---> Y1 ---> Y2	-	0,569 x 0,764 = 0,437	(0,569 x 0,764) - 0,570 = -0,133
X3 ---> Y1 ---> Y2	-	0,248 x 0,764 = 0,189	(0,248 x 0,764) + 0,002 = 0,191

Dapat disimpulkan, bahwa seluruh variabel eksogen (PAD, DBH Pajak, dan DBH Non Pajak) secara langsung di sub-struktur 1 terhadap variabel endogen adalah positif. Sementara, 3 (tiga) variabel (PAD, DBH Non Pajak, dan Belanja Daerah) pada sub-struktur 2 yang secara langsung berdampak positif terhadap variabel endogen.

Terbukti dari pengaruh langsung DBH Pajak terhadap Belanja Daerah memiliki nilai koefisien jalur paling besar yaitu 0,569. Berbanding terbalik, jika dibandingkan dengan fungsi (sub-struktur) 2, justru pengaruh langsung antara DBH Pajak yang memiliki nilai koefisien terendah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yakni -0,570. Efek secara tidak langsung dari kesemua variabel, yakni: PAD, DBH Pajak, dan DBH Non Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah, masing-masing dengan koefisien positif dengan besaran masing-masing adalah 0,196; 0,437; dan 0,189.



Gambar 1. Hubungan lengkap struktur path

Analisis jalur berdasarkan kedua hubungan struktur yang telah dipaparkan sebelumnya yang distandarkan korelasi, dapat dipecah kedalam komponen-komponen, struktural (kausal) dan non struktural (non-kausal) didasarkan teori yang dinyatakan dalam diagram jalur. Lebih lengkapnya, tiap jalur variabel dapat digambarkan sub-struktur keseluruhan (lihat Gambar 1).

SIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerimaan daerah, akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan Dana Perimbangan terutama penerimaan dari pajak yang akhirnya dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan Kalimantan Timur, terutama Belanja Daerah.

Dana Bagi Hasil Pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan DBH Pajak menjadi satu diantara sumber pembiayaan yang berguna dalam menunjang kegiatan-kegiatan sektor publik bagi Kalimantan Timur. Dengan skema DBH Pajak, akan menyebabkan penyediaan layanan publik menjadi lebih tinggi dan mampu menunjang program-program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui pengalokasian terhadap belanja daerah yang meningkat pula.

Dana Bagi Hasil Non Pajak secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan permasalahan DBH di Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan sering terjadi keterlambatan penerimaan DBH. Rumitnya proses transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah membuat proses pembangunan melalui Belanja Daerah menjadi tidak optimal.

Pendapatan Asli Daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan apabila ada kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, akan menyebabkan kenaikan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak tumbuhnya nilai berbagai sektor.

Dana Bagi Hasil Pajak secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan hubungan antara DBH dari sektor Pajak dan pertumbuhan ekonomi yang negatif, dikarenakan nominal dari realisasi DBH Pajak Provinsi Kalimantan Timur tidak setinggi DBH Non Pajak, sehingga wilayah ini masih mengandalkan dari sumbangan SDA-nya

Dana Bagi Hasil Non Pajak secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan penurunan sektor pertambangan dan pengalihan, tidak hanya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, tetapi juga kontribusinya terhadap sektor migas dan mineral nasional.

Belanja Daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan belanja daerah yang semakin tinggi, maka merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dapat meningkat.

Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan tingginya belanja daerah berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD, baik yang berasal dari pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain.

Dana Bagi Hasil Pajak secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan DBH Pajak yang efektif dan efisien dapat dilihat dari bagaimana terjadi perbaikan kehidupan masyarakatnya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah.

Dana Bagi Hasil Non Pajak secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan kenaikan DBH Non Pajak dari sektor migas dan gas yang sedang dituntut Kalimantan Timur, akan berpotensi meningkatkan inefisiensi alokasi dana bagi wilayah penghasil, karena dana tersebut cenderung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dibanding kesejahteraan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P.H. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Padang.
- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, 2009, Pajak Daerah, Undang – Undang Nomor 28
- Anonim, 2014, Penganggaran Belanja Langsung Dalam Rangka Melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah, Undang – Undang Nomor 23
- Arsyad, Lincold. 2001. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE. YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN, Yogyakarta.
- BPS Kaltim, 2016. Kalimantan Timur Dalam Angka 2016, BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- BPS Kaltim, 2016, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2015, BPS Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda
- Bratqa, Aloysius G., 2004, Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional, Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Carol J Pierce & Capistrano, Colfer, Doris. 2005. Politik Desentralisasi, Kekuasaan dan Pengalaman di Berbagai Negara. Jakarta.
- Deddi, Noordiawan. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta.
- Djarwanto dan Subagyo, Pangestu, (2000), Statistik Induktif, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.
- Ferdinand, Augusty. 2006. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

-
-
- Gujarati, N. Damodar. 2006. *Essential of Econometrics*. New York, USA : McGraw-Hill.
- Gujarati, Damodar. 2010, *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indah, Syahputra. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jamzani, Sodik. 2007, *Pengeluaran Pemerinah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi–UPN. Yogyakarta.
- Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press.Jakarta.
- Kaho, Y.R., 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahyuni, 2013, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*, FEB – Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Miyasto, 2009, *“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochammad Rizky Azzumar, 2011, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi-Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyana, Subhkan, 2006, *“Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nur Indah, Rammawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah*, Fakultas Ekonomi-Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ni Wayan, Nuryanti Dewi. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Udayana. Bali.